

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

KEGIATAN MENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN PADA DEPARTEMEN
PENGATURAN DAN PENGEMBANGAN PASAR MODAL OJK
SERTA KEGIATAN ADMINISTRASI PADA SERVICE
QUALITY AND DISTRIBUTION DIVISION DAN OBSERVASI
KANTOR CABANG PEMBANTU PONDOK GEDE

Oleh: Azkya Rifdah Aulia - 20201211055

Dosen: Dr. Sparta, S.E., M.E., Ak., CA



LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi digital akan terus menimbulkan peluang dan tantangan bagi para tenaga kerja. Kesenjangan antara keterampilan pekerja dan kebutuhan bisnis berpotensi terus terjadi pada masa depan. Pemerintah dan perusahaan pun dituntut untuk memberikan kesempatan belajar dan pelatihan ulang keterampilan (Mediana, 2023).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini sejalan dengan nilai yang dimiliki oleh Indonesia Banking School untuk menciptakan lulusan yang berkualitas yaitu Integrity, Skill, dan Knowledge.

Program yang dimiliki oleh IBS untuk meningkatkan Skill adalah melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan. PKL/Magang adalah sebuah program yang diperuntukkan bagi mahasiswa/i untuk menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah dan diterapkan ke dunia kerja yang sebenarnya.

TUJUAN MAGANG

1. Melakukan link and match kurikulum dengan dunia nyata, sehingga mahasiswa memperoleh jaringan dengan dunia kerja;
2. Mengenalkan kepada mahasiswa mengenai kegiatan yang dilakukan oleh tempat praktik kerja/magang;
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja sektor perbankan yang relevan dengan profesi yang akan diembannya di Masyarakat;
4. Memberikan keterampilan tambahan yang berguna untuk kerja di masa depan;
5. Melatih sikap mental yang berguna dalam rangka pengembangan attitude yang lebih baik.

OTORITAS JASA KEUANGAN



DEFINISI

Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan



VISI

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.



NILAI

- Integritas
- Profesionalisme
- Sinergi
- Inklusif
- Visioner



MISI

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

BANK TABUNGAN NEGARA



DEFINISI

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.



NILAI

- Amanah
- Kompeten
- Harmonis
- Loyal
- Adaptif
- Komunikatif



VISI

Menjadi The Best Mortgage Bank di Asia Tenggara pada tahun 2025.



MISI

1. Secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah;
2. Mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak;
3. Menjadi home of Indonesia's best talent;
4. Menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.

SEJARAH OTORITAS JASA KEUANGAN

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Selain pertimbangan-pertimbangan terdahulu, Undang-Undang juga mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut di atas pada hakikatnya merupakan lembaga bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. Lembaga ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan ini disebut Otoritas Jasa Keuangan.

PRODUK OJK

Tabel 3. 1 Tabel Produk OJK

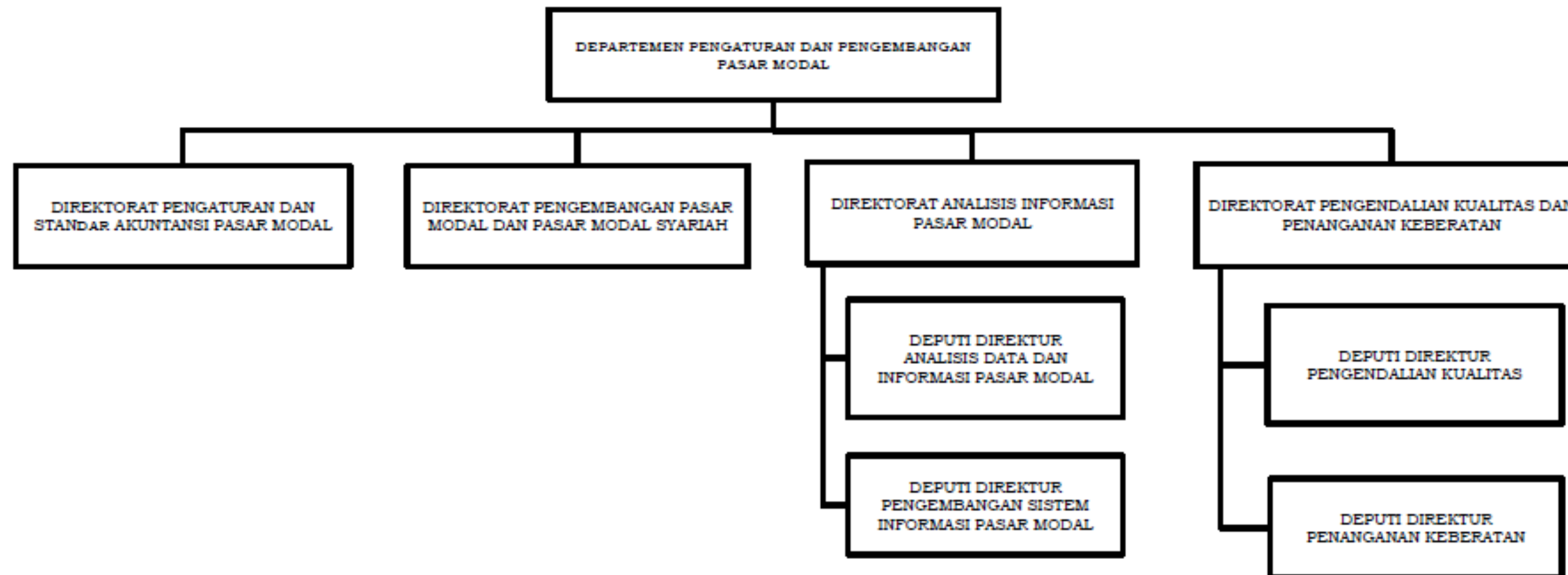
Jenis Produk	Nama Produk
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)	<ol style="list-style-type: none">1) POJK 20/POJK.04/2021 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK)	<ol style="list-style-type: none">1) SEOJK 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.2) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/SEOJK.04/2023 Tentang Penyampaian Informasi Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Rangka Penyusunan Daftar Efek Syariah.



STRUKTUR ORGANISASI DPPPM



STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN PENGATURAN DAN PENGEMBANGAN PASAR MODAL



FUNGSI DAN TUGAS POKOK DPPM

FUNGSI

- Koordinasi pengembangan, pengaturan, penyusunan kebijakan dan standardisasi teknis, hubungan kelembagaan, kehumasan, kerja sama internasional di sektor Pasar Modal
- Pemberian pertimbangan, saran, dan pendapat di sektor Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah
- Pengendalian kualitas dan penanganan keberatan dalam rangka penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal

TUGAS POKOK

- Melakukan pengembangan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah;
- Melakukan pengembangan, penyusunan peraturan pasar dan aset digital, akses keuangan digital, bursa karbon, badan pengelola instrumen keuangan, pengelola dana perwalian dan keuangan derivatif melalui Pasar Modal;
- Menyusun kebijakan terkait ketentuan akuntansi di sektor Pasar Modal;



SEJARAH BANK TABUNGAN NEGARA

Bank BTN dimulai dengan didirikannya Postspaarbank di Batavia pada tahun 1897, pada masa pemerintah Belanda. Kemudian diambil alih pemerintah Jepang dan diganti namanya menjadi Tyokin Kyoku. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, Tyokin Kyoku diambil alih oleh pemerintah Indonesia, dan namanya diubah menjadi Kantor Tabungan Pos RI serta menjadi satu-satunya lembaga tabungan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1963 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 62 tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963, maka resmi sudah nama Bank Tabungan Pos diganti namanya menjadi Bank Tabungan Negara. Dalam periode ini posisi Bank BTN telah berkembang dari sebuah unit menjadi induk yang berdiri sendiri.

Bank BTN tunjuk oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 29 Januari 1974 melalui Surat Menteri Keuangan RI No. B-49/MK/I/1974 sebagai wadah pembiayaan proyek perumahan untuk rakyat. Sejalan dengan tugas tersebut, maka mulai 1976 mulailah realisasi KPR (Kredit Pemilikan Rumah) pertama kalinya oleh Bank BTN di negeri ini. Waktu demi waktu akhirnya terus mengantar Bank BTN sebagai satu-satunya bank yang mempunyai konsentrasi penuh dalam pengembangan bisnis perumahan di Indonesia melalui dukungan KPR BTN. Pada tahun 1992 status Bank BTN ini menjadi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) karena sukses Bank BTN dalam bisnis perumahan melalui fasilitas KPR tersebut. Status persero ini memungkinkan Bank BTN bergerak lebih luas lagi dengan fungsinya sebagai bank umum (komersial).

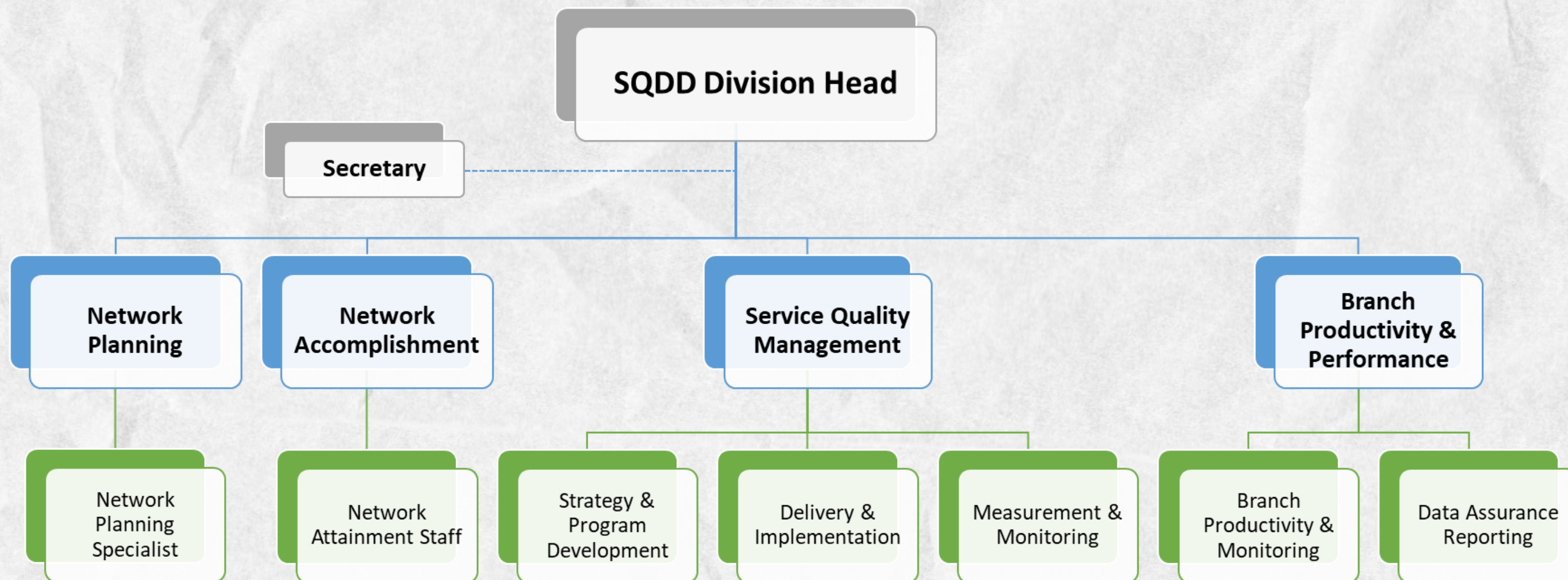
PRODUK BANK TABUNGAN NEGARA

Tabel 3. 2 Tabel Produk Bank BTN

Jenis Produk	Nama Produk
Produk Dana	<ol style="list-style-type: none">1) Tabungan BTN Batara2) Tabungan BTN <u>Bisnis</u>3) Deposito BTN Lembaga4) Giro BTN
<u>Kredit Consumer</u>	<ol style="list-style-type: none">1) KPR BTN Sejahtera2) <u>Kredit Pemilikan Apartemen BTN</u>3) <u>Bantuan Perumahan PNS</u>4) <u>Kredit Ringan BTN</u>
<u>Kredit Komersil</u>	<ol style="list-style-type: none">1) <u>Kredit investasi</u>2) <u>Kredit usaha rakyat</u>



STRUKTUR ORGANISASI SQDD



TANGGUNG JAWAB SQDD

- Mengembangkan strategi perluasan jaringan BTN dalam rangka pengembangan bisnis agar jaringan BTN dapat berkembang semakin luas
- Mengembangkan strategi pengelolaan dan maintenance jaringan outlet (termasuk jaringan outlet yang beroperasi diluar kantor) Bank BTN guna memastikan kegiatan maintenance berjalan dengan baik
- Mengembangkan arahan strategis terhadap peningkatan Service Quality seluruh aktivitas bisnis bank (konvensional dan sharia) guna meningkatkan pelayanan bisnis BTN
- Mengembangkan strategi pengawasan dan evaluasi terhadap produktivitas dan kinerja kantor cabang guna memastikan kegiatan pengawasan dan evaluasi berjalan dengan baik
- Mengembangkan arahan strategis pengelolaan hubungan baik dengan badan pemerintah yang relevan guna membangun hubungan baik dengan pemerintah serta pengembangan strategis keagenan
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi literasi dan inklusi keuangan



BAB 4

PENYUSUNAN RANCANGAN POJK

01

Mengikuti Focus Group Discussion dan Membuat Notulensi

RPOJK dipaparkan dalam FGD untuk mendengarkan tanggapan dari berbagai pihak. Dalam sesi tanggapan, penulis diberi tugas untuk membuat notulensi

02

Membuat Matriks Tanggapan

Peserta FGD menyampaikan tanggapan tertulis dan mengirimkannya ke email PIC DPAM. Setelah tanggapan diterima, penulis diminta untuk membuat matriks atas tanggapan yang telah ada.

03

Membuat Undangan dan Rundown Konsinyering

Penulis diminta untuk membuat undangan kepada Direktur DPAM serta penyusun rundown selama acara berlangsung, dimana acara konsinyering ini berlangsung selama 2 hari.

The image shows a Zoom meeting window on the left and a Microsoft Word document on the right. The Zoom meeting is titled 'Zoom Meeting You are viewing DPAM Lia Evanty Andriany's screen'. The slide in the Zoom meeting is titled 'Ketentuan Mengenai Keadaan Lalai dalam Kontrak Perwallamanatan' and contains text about contract terms and stakeholder responses. The Word document is titled 'Document1 [Compati... azkyarifdah@gmail.com' and contains a list of questions and answers regarding the RPOJK document.

Pertanyaan:

1. Bagaimana jika emiten tdk menyediakan informasi dlm situs web
2. Perlu ditambahkan sanksi adm

Jawab:

1. OJK tidak bisa memberikan sanksi adm, kecuali sanksi bahwa OJK tidak dapat mengeluarkan surat efektif. Perlu dikaji lagi apakah 3 bulan wtu yang pas.

Pertanyaan:

1. Pertimbangan penambahan pengaturan mengenai jangka waktu pengumuman

Jawab:

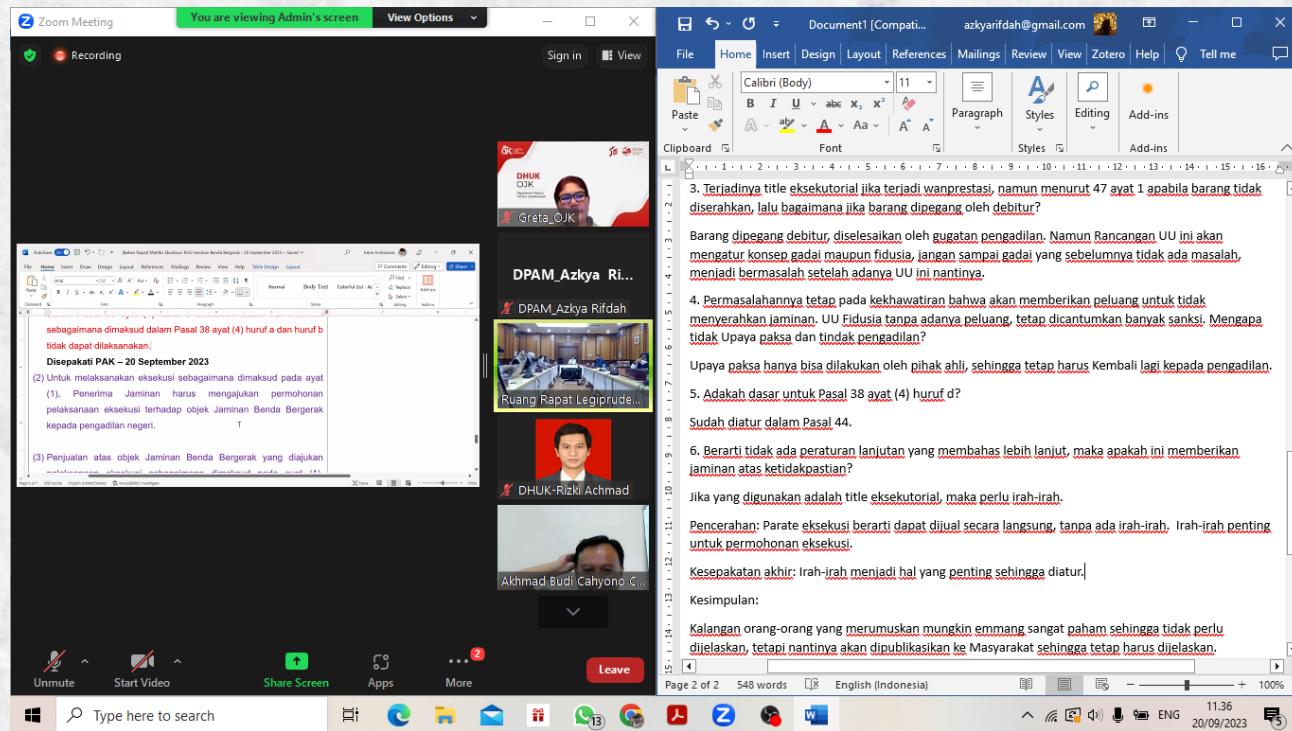
1. Tidak ada perubahan, dimana pengumuman yaitu 5 hari kerja. Akan didiskusikan Kembali dengan DIPM dan DPAM apakah 5 hari tersebut adalah waktu yang pas

Pertanyaan:

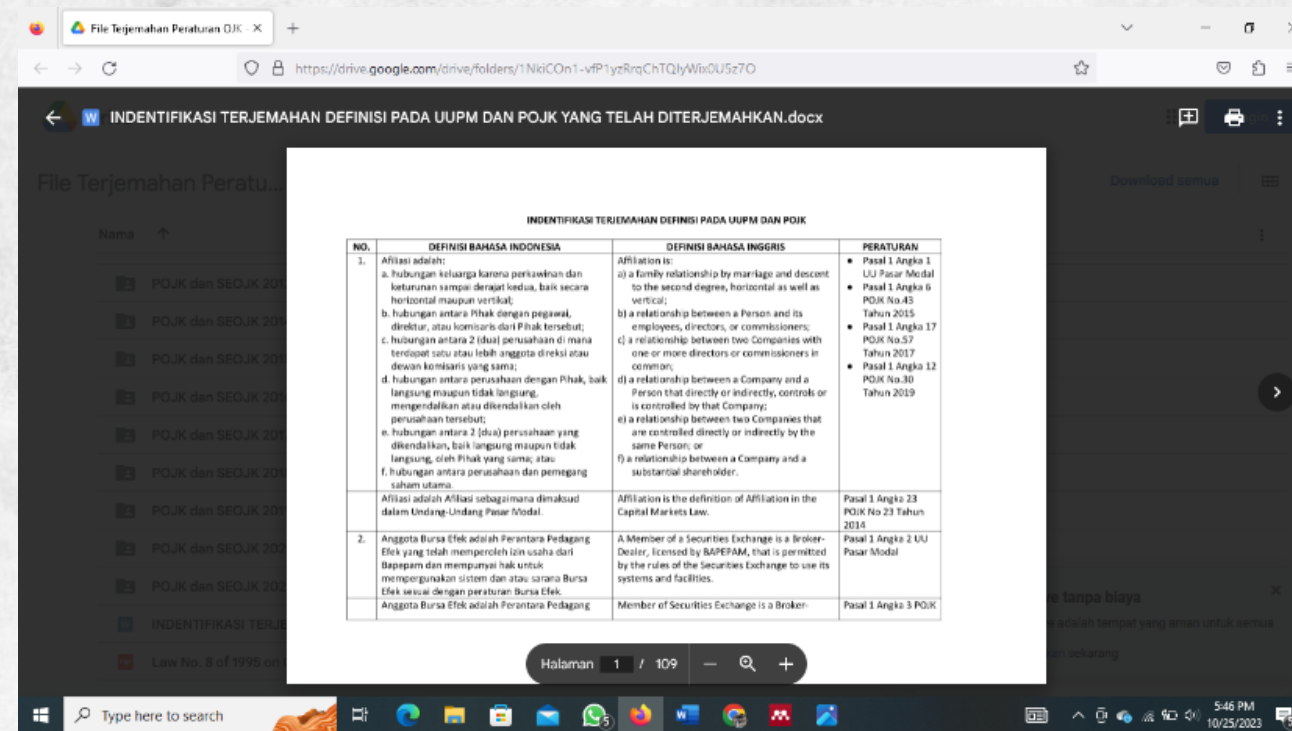
BAB 4

PEKERJAAN/KEGIATAN LAIN SAAT MAGANG

Menghadiri Undangan Rapat Zoom Internal maupun Eksternal



Membuat Matriks Definisi Peraturan Bapepam dan POJK



Mengikuti Acara Program Budaya DPPM



KENDALA

Kendala teknis yang dihadapi penulis adalah wifi yang disediakan tidak bisa terhubung ke laptop penulis

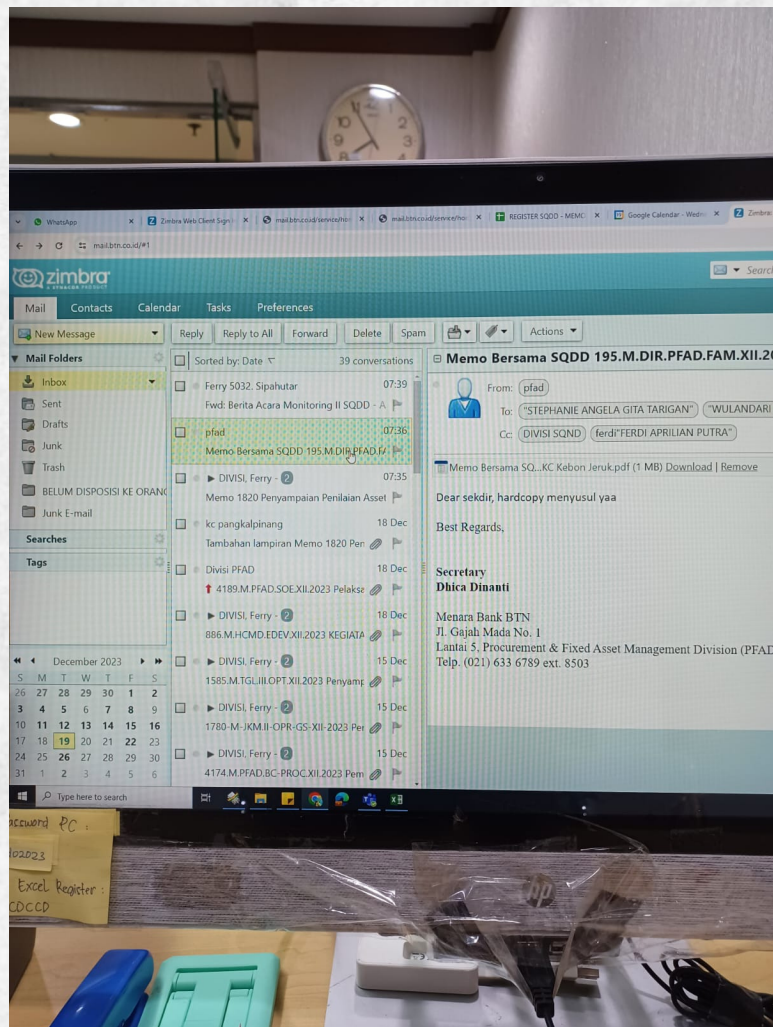
JALAN KELUAR

Penulis menggunakan Hotspot pribadi agar bisa mengakses internet di laptop

BAB 4

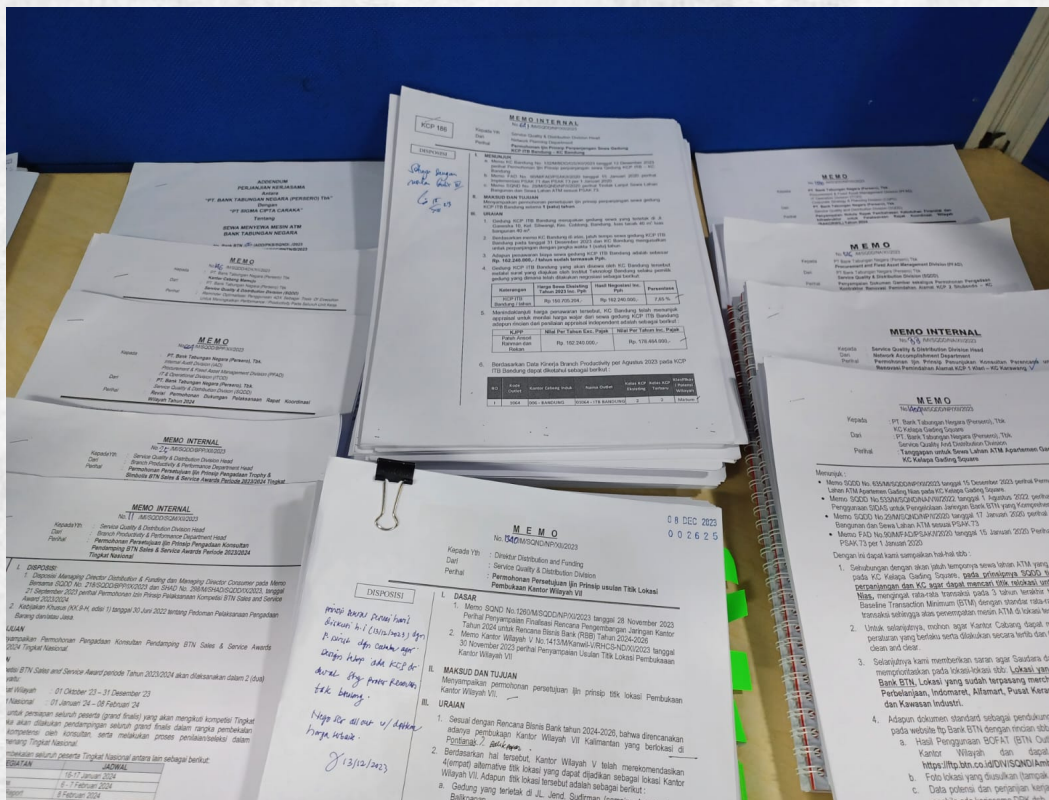
ADMINISTRASI DOKUMEN SQDD

MENERIMA DOKUMEN MASUK



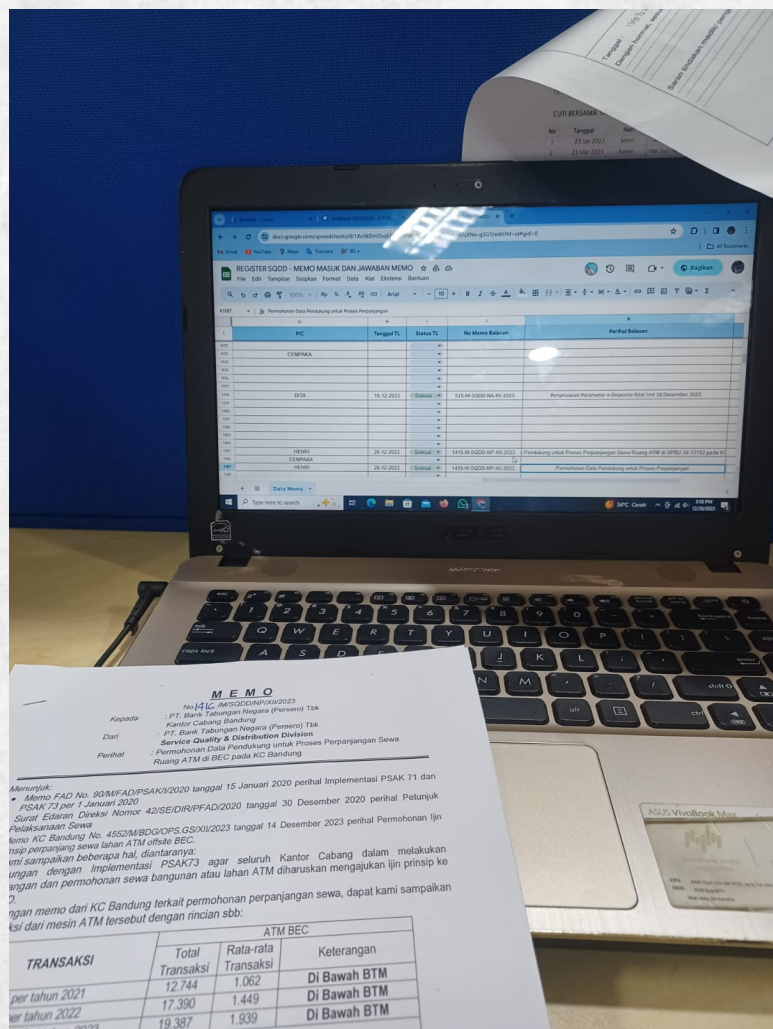
01

MEMILAH DOKUMEN SESUAI KODE DEPARTEMEN

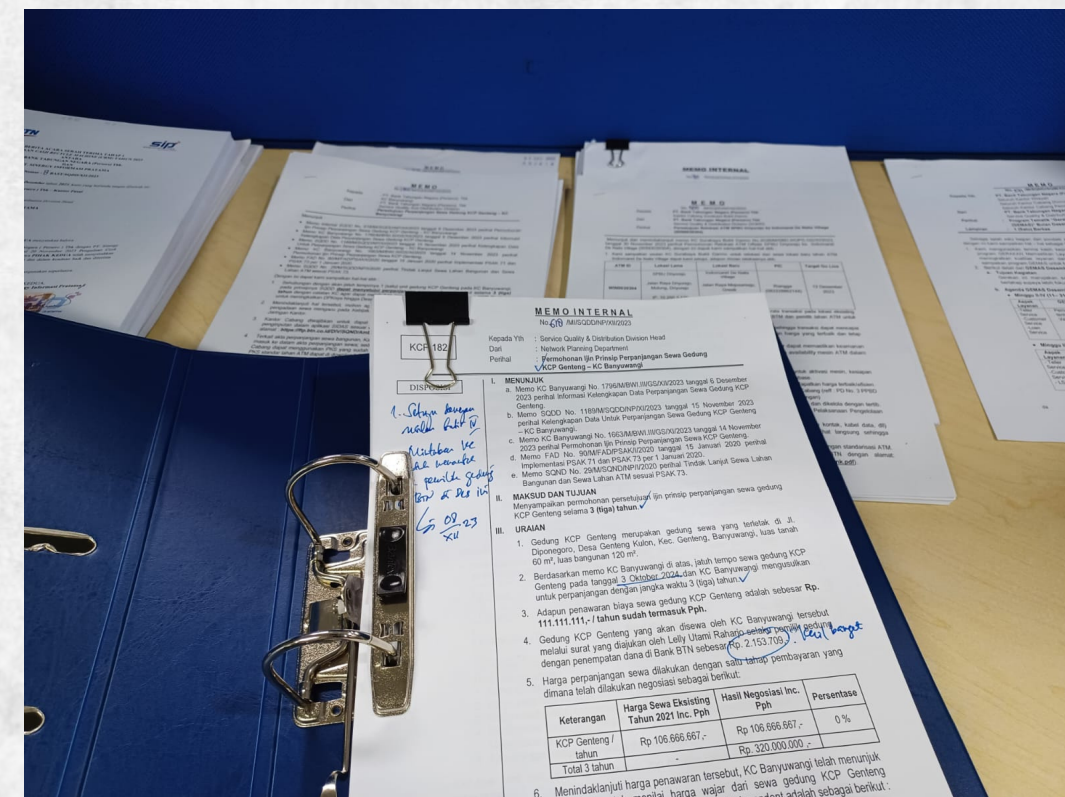


03

02 REGISTRASI DOKUMEN KELUAR



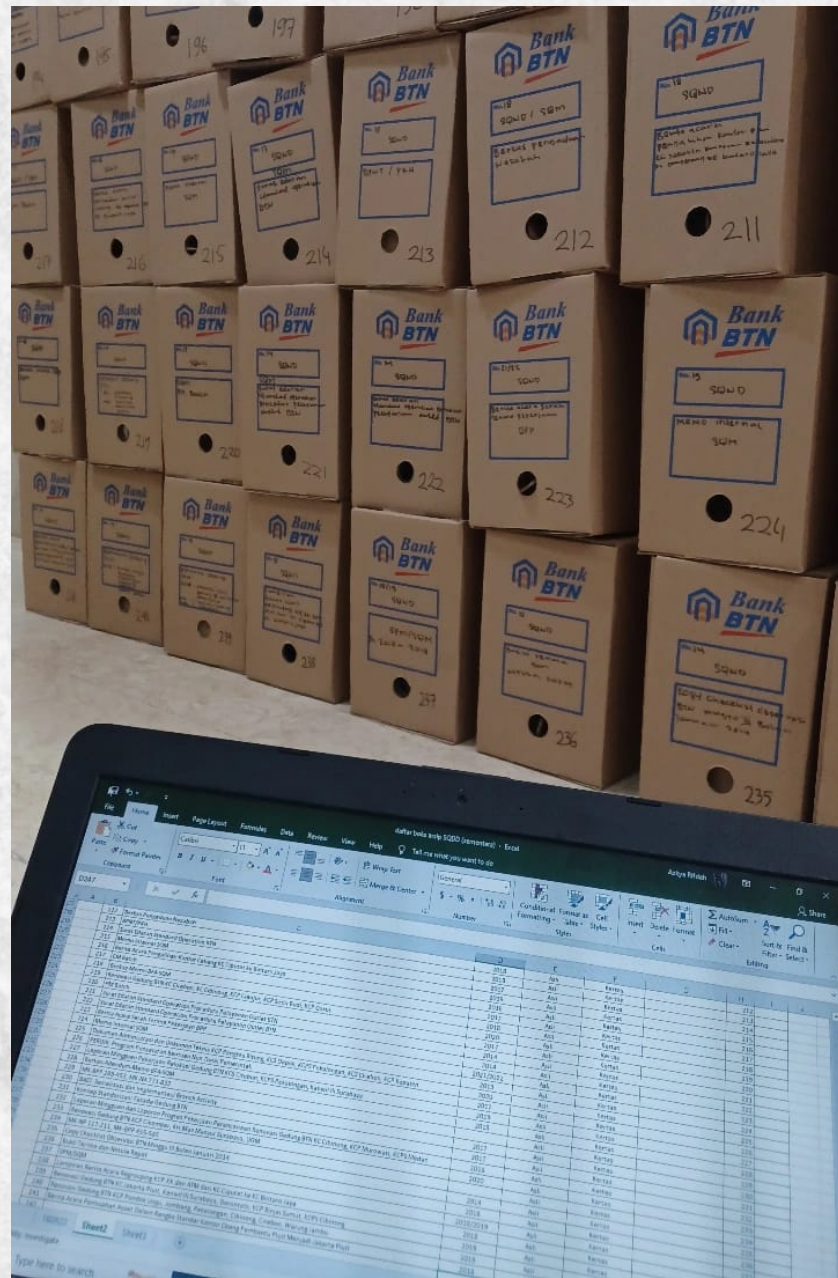
04 MENGARSIP KE DALAM BANTEK



BAB 4

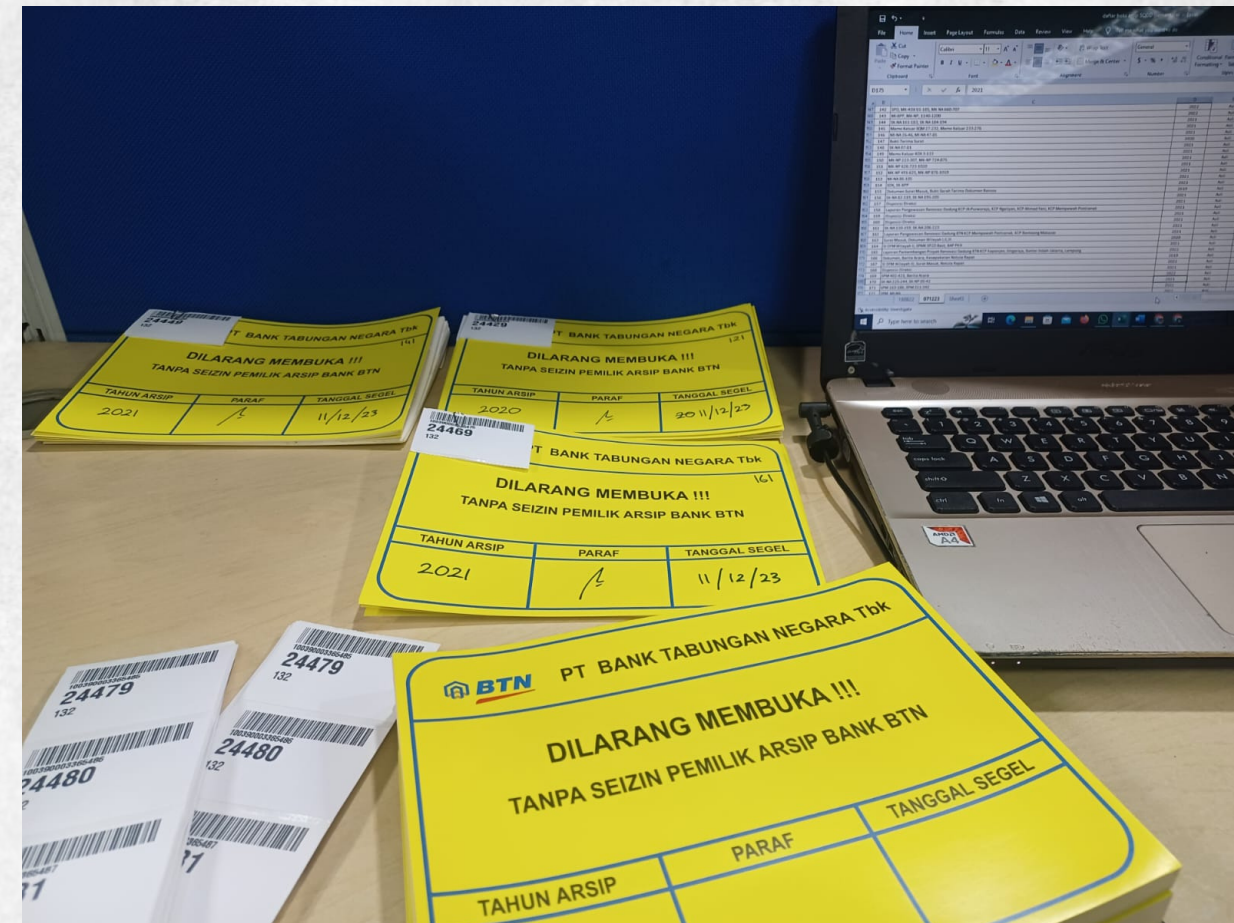
ARSIP DOKUMEN LAMA

MENGINPUT DAFTAR BOX ARSIP KE DALAM EXCEL



01

MENGINISI STIKER SEGEL SESUAI DATA EXCEL



02

BAB 4

OBSERVASI KCP PONDOK GEDE

ON THE SPOT KUR

SOSIALISASI PRODUK



NEGOSIASI DENGAN CALON NASABAH



BAB 4

OBSERVASI KCP PONDOK GEDE

MENGUNJUNGI DEVELOPER



AKAD KUR



CANVASSING PASAR PONDOK GEDE



BAB 4

PEKERJAAN/ KEGIATAN LAIN SAAT MAGANG

Presentasi Kegiatan Observasi



Morning Briefing



Meeting Tim KCP Pondok Gede



Menarik Data Mesin Antrian

MESIN ANTRIAN KC 2023 update (1) - Excel

No.	KANTOR WILAYAH	KANTOR CABANG	CS			Teller			Nilai	SLA	Satuan	CS Open Account
			Open Account	Setor	Tarik	Transfer						
1	I	KC. BANDUNG	3	2	1	1	120	≤ 25	menit	120		
2	I	KC. BOGOR	10	1	1	1	110	26-30		120		
3	I	KC. BEKASI	20	1	1	1	90	31-35		120		
4	I	KC. TANGERANG	20	1	1	1	60	> 36	120			
5	I	KC. CIBERON	18	3	6	4			120			
6	I	KC. PURWAKARTA	15	1	1	7			120			
7	I	KC. DEPOK	22	7	11	6			120			
8	I	KC. CIMAHI	16	1	1	1			120			
9	I	KC. CIKARANG	14	1	1	1			120			
10	I	KC. CIBUBUR	7	1	3	1			120			
11	I	KC. KARAWANG	19	1	3	2			120			
12	I	KC. HARAPAN DIDAH	15	1	4	1			120			
13	I	KC. BGD TEBER	19	2	3	1			120			
14	I	KC. PEKAYONG	1	1	1	1			120			
15	I	KC. CIBINONG	7	3	3	0			120			
16	II	JAKARTA KUNTINGAN	20	1	1	1			120			
17	II	JAKARTA HARMONI	13	3	3	3			120			
18	II	TANGERANG	8	2	1	1			120			
19	II	CIPUTAT	19	2	2	1			120			

KENDALA DAN JALAN KELUAR

KENDALA

- Selama melakukan arsip, beberapa kali kekurangan bantex sehingga banyak dokumen yang belum bisa di arsip hingga selesai.
- Saat menarik data mesin antrian, terkadang website/ url internal not responding ataupun data tidak muncul, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaan.

JALAN KELUAR

- Jalan keluar yang penulis lakukan adalah mencari bantex kosong di lemari lain atau meminta tolong mas Yasin selaku OB untuk mencari bantex kosong.
- Jalan keluar yang penulis lakukan adalah menginformasikan kepada staf terkait dan dibantu untuk menggunakan url lainnya.

KESIMPULAN

Penulis telah melaksanakan praktik kerja lapangan di OJK, Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, dengan scope yang lebih kecil yaitu di Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal (DPPM) selama 2 (dua) bulan. Selama praktik kerja lapangan, penulis lebih terfokus dalam pekerjaan supporting penyusunan salah satu rancangan POJK seperti mengikuti RDP, membuat notulensi, menyusun tanggapan tertulis, dan membuat undangan serta rundown konsinyering. Setelah mengikuti pekerjaan tersebut, penulis memahami bahwa proses RPOJK menjadi POJK sangat panjang, rumit, dan dibutuhkan analisa yang mendalam karena banyak aspek yang harus diperhatikan. Praktik kerja di OJK telah memberikan penulis pengalaman dan ilmu yang sangat berharga. Menambah wawasan penulis mengenai proses penyusunan POJK serta memahami budaya kerja di lingkungan OJK.

Selain itu penulis juga telah selesai melaksanakan magang selama 2 (dua) bulan di Service Quality and Distribution Division (SQDD). Selama magang banyak ilmu dan juga pengalaman baru yang di dapatkan oleh penulis, terutama kesempatan untuk terjun langsung di Kantor Cabang Pembantu. Di sisi lain, penulis juga mendapatkan gambaran budaya kerja dan pekerjaan yang dilakukan di Service Quality and Distribution Division (SQDD).

KETERBATASAN

- Banyak pekerjaan di OJK dan BTN yang sifatnya rahasia, sehingga hanya sedikit pekerjaan yang penulis lakukan selama praktik kerja lapangan berlangsung dan penulis hanya bisa melakukan pekerjaan supporting yang bersifat umum.
- Selain itu di OJK penulis belum bisa diikuti sertakan dalam kegiatan di luar kantor (dinas) karena peraturan yang ada.

SARAN

- Kedepannya peserta praktik kerja lapangan OJK dan BTN diberikan lebih banyak pekerjaan agar dapat menambah pengalaman kerja yang lebih baik meskipun hanya pekerjaan supporting/ administrasi.
- Saat mentor melakukan pekerjaan dinas, alangkah baiknya peserta praktik kerja tetap diberikan pekerjaan.

DOKUMENTASI

FOTO BERSAMA TIM SQDD



FOTO BERSAMA MENTOR OJK



FOTO BERSAMA TIM KCP PONDOK GEDE



MAKAN SIANG
BERSAMA TIM DPAM



THANKYOU

